

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran mulai memanas semenjak diberlakukannya embargo multilateral pada akhir tahun 2006 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Iran dianggap tidak mematuhi resolusi nuklir.¹ Resolusi (DK-PBB) memberlakukan sanksi pertama terhadap Iran termasuk pelarangan pengiriman material nuklir dan pembekuan perusahaan-perusahaan Iran yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Iran. Hubungan kedua negara tersebut mulai membaik pada masa pemerintahan Barack Obama.² Peralihan kepemimpinan Amerika Serikat dari George Bush kepada Barack Obama turut menjadi faktor dalam memperbaiki hubungan yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Terlebih ketika Barack Obama memberikan ucapan selamat tahun baru kepada warga Iran (Nowruz).³ Tidak hanya itu, Barack Obama juga menyinggung potensi untuk memperbaiki hubungan antar kedua negara ini termasuk peluang yang lebih besar untuk mencapai kemitraan dan perdagangan. Amerika Serikat mempunyai kepentingan nasional terhadap kawasan Timur Tengah yang berkaitan dengan Iran, diantaranya seperti mempertahankan Israel dan penyelesaian proses perdamaian di

¹ Kiki Mikail, "Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah", Jurnal ICMES, (2018), hal. 75

² Yantina Debora, "Perbedaan Hubungan AS-Iran Era Donald Jhon Trump dan Barack Obama", <https://tirto.id/perbedaan-hubungan-as-iran-era-donald-trump-dan-barack-obama-eroM>, (diakses pada 8 Januari, 2020).

³ Yantina Debora, "Perbedaan Hubungan AS-Iran Era Donald Jhon Trump dan Barack Obama"

Timur Tengah, terbukanya akses minyak, mencegah munculnya kekuatan lain yang lebih kuat, mencegah penyebaran senjata pembunuh massal dan meningkatkan reformasi ekonomi dan politik melalui stabilitas politik.⁴ Dalam pidatonya Barack Obama mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mengadakan pertemuan yang kondusif dengan Iran.⁵ Pada akhirnya, hubungan Amerika Serikat dengan Iran mulai menunjukkan kemajuan, khususnya terkait permasalahan nuklir Iran. Barack Obama lebih mengutamakan cara diplomasi terhadap Iran dari pada melalui perang. Oleh sebab itu, Amerika Serikat bersama dengan negara lain menginisiasi perjanjian yang mengatur program nuklir Iran yang dikenal dengan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).⁶

JCPOA merupakan sebuah perjanjian internasional yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2015 di Wina, Austria.⁷ Adapun negara yang tergabung, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, Jerman dan Iran. Kesepakatan ini mencakup program-program pengayaan nuklir Iran dengan langkah-langkah transparansi serta untuk memastikan sifat yang damai. Di samping itu, dalam JCPOA terdapat suatu kesepakatan permanen berupa sanksi komprehensif dengan imbalan pembatasan untuk jangka waktu yang telah disepakati pada ruang lingkup dari kegiatan pengayaan nuklir Iran, serta komposisi stok uranium yang diperkaya di Teheran.

⁴ Kiki Mikail, Hal. 78

⁵ Ramin Jahanbegloo, "The Obama Administration and Iran: Towards a Constructive Dialogue", Working Paper no. 43 (2009) Hal. 20

⁶ Ismi Karima, "Pendatanganan Kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) oleh Iran Tahun 2015", Jurnal analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, 2018, hal. 240

⁷ Luh Gede Ria Riski Sari Purnama Dewi dkk, "Kepentingan Amerika Serikat Menarik Diri Dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) Tahun 2018", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Hal 1.

Selanjutnya, kepatuhan Iran terhadap perjanjian ini akan diawasi dan dikontrol oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Sejak tahun 2016, IAEA telah merilis verifikasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan laporan pemantauan tentang implementasi Iran terhadap ketentuan JCPOA berdasarkan Resolusi DK-PBB 2231.⁸ Laporan-laporan tersebut secara konsisten menunjukkan kepatuhan Iran dalam mengimplementasikan JCPOA. Setelah JCPOA diresmikan, Amerika Serikat secara resmi mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Iran dan juga termasuk negara-negara yang ikut membantu Iran. Kewajiban yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam *Annex* JCPOA pada pasal empat yaitu memberikan layanan asuransi yang berhubungan dengan kegiatan terkait JCPOA, memberikan investasi kepada Iran, menyediakan layanan untuk menyuplai serta mengeksport emas dan logam ke Iran, memasok aluminium dan baja untuk mengintegrasikan proses industri ke Iran, dan juga memfasilitasi transaksi keuangan dalam bidang otomotif Iran.⁹ Selain itu, Amerika Serikat juga berkomitmen untuk mengizinkan Iran untuk mengakses sekitar USD100 miliar pendapatan luar negeri yang sebelumnya dibekukan, menghentikan penerapan sanksi ekonomi terhadap minyak dan perbankan Iran. Ketika setelah delapan tahun dari diberlakukannya JCPOA, jika IAEA melaporkan aktivitas nuklir Iran berjalan damai maka akan mencari tindakan legislatif untuk menghentikan atau memodifikasi sanksi

⁸ Satwika Paramasatya dan Sigit Wiranto, "Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)", *Jurnal Hubungan Internasional* Tahun XII, No.2, (2019) Hal. 103

⁹ Annex JCPOA, Hal 68.

terkait nuklir Iran, dan Amerika Serikat akan berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang terlibat untuk ikut mematuhi kebijakan JCPOA.¹⁰

Terjadinya pergantian rezim dari pemerintahan Barrack Obama ke Donald Jhon Trump, berimplikasi terhadap keikutsertaan Amerika Serikat terhadap JCPOA. Sejak masa kampanye, Donald Jhon Trump menyatakan bahwa kesepakatan nuklir Iran merupakan kesepakatan terburuk dan memalukan yang pernah dicapai oleh Amerika Serikat.¹¹ Setelah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Jhon Trump ingin menegosiasikan kembali isi dari perjanjian ini.¹² Namun, hal ini ditolak oleh Uni Eropa, karena Uni Eropa tidak ingin mempertimbangkan sanksi dan aturan baru terkait JCPOA. Dengan demikian, Amerika Serikat mulai tidak mematuhi aturan JCPOA dan tidak melakukan komitmen-komitmen yang telah disepakati pada awalnya, seperti adanya batasan perdagangan bilateral pada pendapatan Iran yang disimpan di luar negeri, melakukan upaya untuk mengurangi penjualan dan pembatasan minyak mentah Iran kepada negara-negara yang dapat membelinya, dan tidak mempercayai laporan yang diberikan oleh IAEA terkait aktivitas nuklir Iran.¹³

Setelah berjalan tiga tahun, Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari JCPOA. Hal ini dinyatakan melalui pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Jhon Trump pada tanggal 8 Mei 2018. Menurut Donald Jhon Trump JCPOA merupakan sebuah fiksi besar yang dinilai tidak memiliki mekanisme yang jelas dan memadai baik untuk mencegah, mendeteksi dan pemberian sanksi terhadap

¹⁰ Paul K. Kerr and Kenneth Katzman, "Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit", (2018) Hal. 32

¹¹ Satwika Paramasatya dan Sigit Wiranto, Hal. 110

¹² Luh Gede Ria Riski Sari Purnama Dewi dkk, Hal. 4

¹³ Paul K. Kerr and Kenneth Katzman, Hal. 62

kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan.¹⁴ Maka dari itu, kesepakatan ini dianggap tidak mampu untuk membatasi kegiatan Iran dalam ambisi pengembangan nuklir maupun rudal balistiknya. Tidak hanya itu, Iran juga tetap melakukan tindakan-tindakan yang mendestabilisasi di kawasan Timur Tengah dengan memicu terjadinya konflik, terror dan kekacauan.¹⁵ Keputusan yang diambil Donald Jhon Trump ini menimbulkan kekecewaan bagi negara yang ikut tergabung. Hal ini seperti yang disampaikan Presiden Prancis, Emmanuel Macron melalui akun *twitter* pribadinya mengatakan bahwa Prancis, Jerman dan Inggris menyesalkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari JCPOA.¹⁶ Maka dari itu penulis menganalisis alasan keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA pada masa pemerintahan Presiden Donald Jhon Trump.

1.2. Rumusan Masalah

Amerika Serikat pada pemerintahan Barrack Obama, merupakan salah satu negara yang menginisiasi JCPOA. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mengatur pengembangan nuklir Iran. Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam JCPOA yaitu dalam bidang ekonomi, bidang otomotif, bidang perangkat lunak serta emas dan logam. Amerika Serikat secara resmi mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Iran dan juga termasuk negara-negara yang ikut membantu Iran, yang pada awalnya juga tidak diperbolehkan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi, setelah terjadinya pergantian rezim ke Donald Jhon Trump, Amerika Serikat memutuskan untuk

¹⁴ Luh Gede Ria Riski Sari Purnama Dewi dkk, Hal. 2

¹⁵ Satwika Paramasatya dan Sigit Wiranto, Hal. 104

¹⁶ Dikutip dari *twitter* Emmanuel Macron, diakses pada tanggal 9 Mei 2018. <https://twitter.com/emmanuelmacron/status/993920765060878336?s=24>

menegosiasikan ulang perjanjian nuklir tersebut, namun ditolak oleh Uni Eropa. Amerika Serikat mulai tidak melakukan komitmen-komitmen yang telah disepakati pada awalnya, seperti membatasi perdagangan minyak mentah Iran dan tidak mempercayai laporan dari IAEA terkait aktivitas nuklir Iran. Akhirnya pada tahun 2018, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari JCPOA. Berdasarkan fakta tersebut, penting untuk dilihat alasan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada masa pemerintahan Donald Jhon Trump?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan penarikan diri Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* pada masa pemerintahan Donald Jhon Trump.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan secara praktis, bagi mahasiswa, dosen, masyarakat dan peneliti untuk memahami lebih baik terkait kepentingan-kepentingan Amerika Serikat terhadap Iran.

Selain itu secara akademis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam konteks tata kelola global serta mengetahui

faktor-faktor pendorong keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian *Joint Comprehensive Plan Of Action* (JCPOA) pada masa pemerintahan Donald Jhon Trump.

1.6. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tulisan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya berfungsi sebagai tolak ukur dan landasan berfikir bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian serta membantu menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Referensi pertama yang penulis gunakan adalah artikel jurnal dari Reza Bakhtiar Ramadhan, "Pengaruh Peningkatan Kekuatan Iran Terhadap Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah".¹⁷ Dalam artikel jurnal ini membahas terkait peningkatan kekuatan militer Iran yang mengancam hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Pasca revolusi islam Iran dibawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini pada tahun 1979 hubungan Iran dan Barat khususnya Amerika Serikat kian menegang. Kebijakan Iran mengenai senjata nuklir telah memicu perlombaan senjata (*arm of race*) di kawasan Timur-tengah. Bahkan Iran dianggap mengancam stabilitas keamanan kawasan. Terutama keamanan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur-tengah. Adanya kepentingan Amerika Serikat di Timur-tengah merupakan tanggung jawabnya terhadap keamanan sekutunya di Timur-tengah, oleh sebab itu Amerika Serikat

¹⁷ Reza Bakhtiar Ramadhan, "Pengaruh Peningkatan Kekuatan Iran Terhadap Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah"Jurnal Studi Keislaman, Volume 19, No. 1, 2019, hal. 211-226

melakukan berbagai upaya untuk mengamankan hegemoninya. Salah satunya seperti memperkuat aliansi dengan sekutunya di Timur Tengah dengan melakukan bantuan pemberian persenjataan militer secara besar-besaran. Hasil dari penelitian ini adalah melihat strategi *Balance of Power* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran yang menyebabkan belum terjadinya perang yang besar, dikarenakan Iran mengetahui kekuatan Amerika Serikat dan begitu juga dengan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran secara frontal, karena Amerika Serikat mengetahui soft power yang dimiliki oleh Iran yang sangat hebat.¹⁸

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu fokus artikel ini membahas strategi Amerika Serikat terhadap Iran dan tidak membahas mengenai perjanjian JCPOA. Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan untuk melihat alasan yang menyebabkan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Namun artikel ini berkontribusi dalam memberikan gambaran hubungan bilateral Iran dan Amerika Serikat.

Kedua, artikel jurnal dari Aldino Yoshitomo, "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India dan Iran".¹⁹ Pada artikel Aldino Yoshitomo, melihat adanya perubahan perilaku Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran yang meningkatkan kecurigaan politik standar ganda yang bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat terkait program nuklir India. Dimana Iran merupakan salah satu negara anggota NPT, sedangkan India bukan bagian dari NPT.

¹⁸ Reza Bakhtiar Ramadhan, hal. 226

¹⁹ Aldino Yoshitomo, "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir India dan Iran", *jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, (2017) Hal. 1149-1162

Penelitian ini berfokus untuk memahami alasan atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih menyukai program nuklir India dari pada Iran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan Amerika Serikat tidak setuju dengan program nuklir Iran terkait karena masalah terorisme, sedangkan mendekati India demi hegemoni Amerika Serikat di Asia. Sikap standar ganda yang diterapkan oleh Amerika Serikat merupakan bentuk dari perubahan arah kebijakan Amerika Serikat sesuai dengan progress dan kepentingan nasionalnya pada saat itu. Terlihat pada perubahan kebijakan nuklir Amerika Serikat berkaitan dengan Iran dan India, dimana kerja sama nuklir dengan Iran yang berubah haluan setelah terjadinya peristiwa 9/11 dan kebijakan *war on terrorism* diterapkan oleh Amerika Serikat serta desakan dari negara sekutu Amerika Serikat yaitu Israel yang merasa *insecure* dengan pengembangan nuklir Iran merasa terancam berdasarkan sejarah perang yang pernah terjadi dan adanya sentiment Anti-yahudi yang berkembang di negara-negara Islam di timur tengah, memaksa pemerintahan Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran karena dikhawatirkan Iran akan meluncurkan senjata nuklirnya apabila teknologi tersebut telah rampung dikembangkan oleh Pemerintah Iran.²⁰

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penelitian penulis, dimana dalam penelitian ini penulis melihat terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, Penulis merasa perlu menggunakan penelitian ini untuk melihat perbandingan perbedaan kebijakan Amerika Serikat terkait nuklir Iran dan India, adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang berfokus membahas faktor-faktor pendorong atas penarikan

²⁰ Aldino Yoshitomo, hal. 1161

diri Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA.

Artikel jurnal ketiga yang menjadi referensi penelitian penulis adalah artikel jurnal dari Chintamani Mahapatra dan Monish Tourangbam yang berjudul "Iran's Quest for Nuclear Weapon Status American Debate on Pre-emptive Strike".²¹ Dalam artikel ini Mahapatra dan Toungrangbam menganalisis terkait perdebatan Amerika Serikat yang dinamis pada saat yang kritis ketika pemerintahan Barack Obama, yang

sebelumnya dipandang sebagai anti tesis dari masa era Bush, dinamika tersebut tampaknya juga memiliki kendala yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya serta sambil mencari kebijakan yang cocok untuk berurusan dengan Iran. Pada masa Bush berbagai upaya dan sanksi telah diberikan kepada Iran, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan Iran masih tetap mengembangkan nuklirnya. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Barack Obama memilih jalan lain untuk menghentikan perkembangan nuklir Iran, yaitu dengan cara melakukan diplomasi tanpa harus melalui *hard power*.²²

Penulis merasa penelitian ini memiliki kontribusi dalam menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Barack Obama dalam menghadapi Iran. Namun, penelitian ini berfokus membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Bush dan pada masa Barack Obama. Walaupun ada kaitannya dengan peralihan kebijakan Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Jhon Trump.

Selanjutnya, referensi keempat yaitu artikel jurnal dari Kiki Mikail yang berjudul "Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah".²³ Dalam artikel

²¹ Chintamani Mahapatra, Monish Tourangbam, "Iran's Quest for Nuclear Weapon Status American Debate on Pre-emptive Strike", *India Quarterly*, (2011) Hal. 229-244

²² Chintamani Mahapatra, Monish Tourangbam, hal. 241

²³ Kiki Mikail, Hal. 69-85

ini Kiki Mikail menjelaskan terkait keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan membahas peralihan rezim dari Obama ke masa Trump serta perubahan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Donald Jhon Trump berpandangan bahwasannya JCPOA akan menguntungkan bagi Iran karena terlepas dari sanksi-sanksi yang telah diberikan sebelumnya. Kepentingan nasional Amerika Serikat paralel dengan kepentingan nasional Israel, sehingga semua keputusan Trump tentang permasalahan Iran merupakan korelasi dengan kepentingan Israel.

Iran sebagai negara anggota IAEA memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir dengan tujuan damai. Namun, sejak tahun 2003, Amerika Serikat mensponsori berbagai bentuk serangan terhadap Iran melalui tuduhan dalam membuat senjata nuklir. Meskipun IAEA tidak pernah mendapatkan bukti pelanggaran Iran terhadap NPT, Amerika Serikat terus-menerus menuduh Iran sedang membuat senjata nuklir dan atas alasan inilah yang memberlakukan berbagai sanksi dan embargo terhadap Iran. Setelah melakukan perundingan selama 12 tahun, Iran dan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China) dan Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman (P5 + 1) menandatangani kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Kesepakatan ini berisikan kesediaan Iran untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun perkembangan selanjutnya justru kontraproduktif. Alih-alih memenuhi janji untuk menghapus embargo terhadap Iran, pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden Donald Jhon Trump menarik Amerika Serikat keluar dari JCPOA. Langkah Donald Jhon Trump dikritik berbagai pihak, termasuk oleh Direktur IAEA dan negara-

negara Eropa. Setahun sebelumnya, Trump telah berjanji kepada Perdana Menteri Israel Netanyahu, bahwa ia tidak membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Prioritas utama kepentingan nasional Amerika Serikat adalah menjaga keamanan Israel. Yang dianggap ancaman utama oleh Israel adalah Iran, karena Iran selalu memberikan bantuan kepada bangsa Palestina dalam upaya meraih kemerdekaan. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Amerika Serikat menghalangi pengembangan nuklir Iran dan langkah-langkah Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA sangat terkait dengan kepentingan Amerika Serikat untuk melindungi Israel.²⁴ Penulis merasa tulisan ini berkontribusi untuk melihat kepentingan nasional Amerika Serikat yang paralel dengan kepentingan Israel, namun penelitian yang peneliti tulis berfokus pada alasan kebijakan Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Jhon Trump yang menarik diri dari JCPOA.

Tinjauan pustaka terakhir yang penulis gunakan adalah artikel jurnal dari Satwika Paramasatya dan Sigit Wiranto, "Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)".²⁵ Artikel ini membahas terkait keputusan, Amerika Serikat menarik diri disebabkan oleh sisi psikologis Donald Jhon Trump. Hal ini dapat dilihat dari sikap Donald Jhon Trump yang cenderung mengabaikan pandangan yang bertentangan dengan dirinya, terbukti dari pemecatan orang-orang penting yang seharusnya ia dengar dalam administrasinya, Sekretaris Negara Rex Tillerson, Penasehat Keamanan Nasional HR McMaster dan Menteri Pertahanan John Mattis. Donald Jhon Trump lebih memilih mengangkat orang yang memiliki pemikiran

²⁴ Kiki Mikail, hal. 83

²⁵ Satwika Paramasatya dan Sigit Wiranto, hal. 101-118

yang sama dengan dirinya. Donald Jhon Trump terjebak dalam perangkap kognitif yang ia ciptakan sendiri yang kemudian membuat dirinya terlalu percaya diri terhadap keputusan yang diambil. Proses pembuatan kebijakan Donald Jhon Trump yang semacam ini menyebabkan kebijakan yang diambil cenderung irasional. Tampaknya Donald Jhon Trump salah melakukan penilaian bahwa upaya penekanan keras terhadap Iran akan melunakkan sikap Iran, bahkan satu tahun setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA menunjukkan fakta bahwa semakin besar ambisi Amerika Serikat menekan Iran, maka semakin besar juga perlawanan yang dilakukan oleh Iran. Keputusan atas keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA bahkan tidak ada negara yang ikut terlibat dalam penandatanganan kesepakatan JCPOA tersebut yang mendukung keputusan Donald Jhon Trump.²⁶

Tulisan ini berkontribusi untuk melihat dinamika yang terjadi didalam internal Amerika Serikat pasca keputusan atas penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA. Meskipun punya fokus yang sama, namun artikel dan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penulis membahas alasan penarikan diri dari sudut pandang kebijakan luar negeri. Setelah dilakukan tinjauan terhadap lima literatur, belum ada yang secara khusus membahas penarikan diri suatu negara, yaitu Amerika Serikat, dari sebuah perjanjian, yakni JCPOA lewat sudut pandang kebijakan luar negeri (konsep determinan).

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri secara umum merupakan sebuah pedoman bagi suatu

²⁶ Satwika Paramasatya dan Sigit Wiranto, hal. 113

negara dalam melakukan tindakan terhadap lingkungan eksternalnya. Tidak hanya itu, kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai komitmen dasar yang berupa sebuah strategi dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara baik dalam konteks internal maupun eksternal yang turut menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional. Tayfur berpandangan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu bentuk tindakan resmi yang dirancang dan diimplementasikan oleh agen-agen resmi dari negara berdaulat sebagai sebuah orientasi, rencana serta komitmen yang ditujukan kepada pihak eksternal dari suatu negara.²⁷

Menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan yang didalamnya terdiri dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau lingkungan eksternal.²⁸ Selanjutnya Kegley dan Wittkopf juga memiliki pandangan terhadap kebijakan luar negeri yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang memiliki wewenang terhadap lingkungan internasional yang didasari oleh adanya suatu kepentingan nasional serta sekaligus memiliki nilai dan instrumen dalam mencapai tujuan tersebut.²⁹ Lalu Holsti juga mendefinisikan kebijakan luar negeri merupakan sebagai ide-ide atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah ataupun untuk menyampaikan sejumlah perubahan baik itu berupa kebijakan,

²⁷ Fatih Tayfur, *Main Approaches to The Study of Foreign Policy: A Review*, Department of International Relations, Middle East Technical University, Turkey (1994) hal. 115-116

²⁸ Mark Webber, Michael Smith, *Foreign Policy in Transformed World*, Prentice Hall, London (2002) hal.11-12

²⁹ Kegley Charles W. Jr, Wittkopf Eugene R, *World Politics:Trend and Transformation*, 6 th ed., New York: St.Martin's Press, (2001) hal. 55

perilaku, maupun tindakan dari negara lain di lingkungan internasional.

Dari beberapa penjelasan definisi kebijakan luar negeri menurut para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasannya kebijakan luar negeri merupakan tindakan yang digunakan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya serta mempromosikan perubahan kebijakan terhadap lingkungan eksternalnya.

Dalam membuat atau merancang suatu kebijakan luar negeri pada suatu negara terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.³⁰ Faktor internal merupakan serangkaian dari dinamika politik domestik yang menjadi pertimbangan sebuah kebijakan dibuat.³¹ Kebijakan luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik domestik sehingga kebijakan luar negeri juga akan menjadi cerminan dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh aktor-aktor di dalam negeri. Sedangkan faktor eksternalnya merupakan sebuah keterkaitan antara aktor dalam hubungan internasional yang akan menentukan tindakan yang diambil secara resiprokal.³² Dalam membuat kebijakan suatu negara akan ditentukan dari negara lain. Contoh dari faktor eksternal adalah *International Law, International organizations, Alliances, dan Military strategy/Arm race.*³³ sedangkan contoh dari faktor internal adalah *Culture and history, Geography, size and population, Economic development and natural resources, Military capabilities, Political system, State Leadership,*

³⁰ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations", "Journal of Political Sciences & Public Affairs", Vol. 6 (2018) Hal. 2

³¹ Angga Nurdin Rahchmat, Kristyono Ratmoko, "Determinan Kebijakan Luar negeri Indonesia Terkait Peningkatan Partisipasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa", (2019) Hal. 7

³² Angga Nurdin Rahchmat, Kristyono Ratmoko, Hal. 6

³³ Bojang AS, Hal. 2

*Political parties and interest groups, Press and public opinion dan Science and technology.*³⁴

Untuk memahami fenomena sosial dalam Hubungan Internasional diperlukan adanya konseptualisasi dalam penyederhanaan fenomena dengan tujuan untuk membantu dalam menganalisa dan memahami fenomena-fenomena yang ada dalam Hubungan Internasional.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep Determinan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “*Introduction of International Politic*”.³⁶

Konsep ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam terbentuknya suatu kebijakan tersebut. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk oleh pengaruh dari berbagai pertimbangan yang ada di dalamnya. Coplin juga menjelaskan adanya empat indikator determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yaitu konteks internasional, perilaku pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer dan politik dalam negeri.³⁷

1. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan tentang bagaimana negara berperilaku yang ditentukan oleh sistem internasional dan hubungan negara tersebut dengan kondisi yang ada dalam sistem internasional tersebut. Kondisi internasional merupakan

³⁴ Bojang AS, Hal. 5

³⁵ Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi (Jakarta, PT Pustaka LP3ES,1994), Hal. 92

³⁶ William D. Coplin, “*Introductions do International Politics : A Theoretical Overview*”, terjemahan Mercedes Marbun, Sinar Baru Bandung, (2003) Hal. 165-174

³⁷ William D. Coplin, *Introductions do International Politics: A Theoretical Overview*

seperangkat faktor yang mempengaruhi politik luar negeri satu negara. Dalam hal ini terdapat tiga elemen penting dari konteks internasional yang mempengaruhi politik luar negeri yaitu geografis, ekonomis dan politis.

Geografis di masa lalu memiliki peran penting dalam politik luar negeri. Dimana negara yang saling berdekatan menyatukan kekuatan dalam menghadapi ancaman atau justru satu negara memperluas wilayahnya ke negara terdekat. Pemikir realis seperti Morgenthau melihat geografis menjadi aspek penting oleh negara dalam menentukan kepentingan nasionalnya terkait aktivitas politik luar negerinya. Namun geografis dalam pemahaman lampau ini dianggap terlalu menekankan konteks internasional sebagai yang berperan penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan luar negeri. Saat ini, geografis masih memainkan peran penting dalam politik luar negeri namun tidak seperti yang dijelaskan oleh pemikir pada masa lalu. Geografis saat ini lebih kepada hubungan antar negara dalam kedekatan geografis seperti dalam perdagangan dan menjadi alasan utama dalam dibentuknya organisasi lintas negara dalam suatu kawasan.

Ekonomi merupakan bagian penting lainnya dalam konteks internasional. Aktivitas ekonomi melalui pertukaran barang dan jasa serta arus modal menunjukkan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara dan seberapa jauh negara tersebut bergantung terhadap negara lain. Negara maju menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda dibanding negara terbelakang yang cenderung lebih bergantung kepada negara maju.

Hubungan politik antar negara memiliki pengaruh terhadap keputusan dalam kebijakan luar negeri satu negara. Aliansi yang terbentuk memiliki pengaruh tidak

hanya bagi negara non-anggota namun juga anggotanya sendiri. Terdapat kondisi yang harus diperhitungkan dalam membuat keputusan terkait keterlibatan satu negara dalam suatu aliansi. Tidak hanya itu, kemampuan dalam mendapatkan dukungan negara lain atas suatu kondisi juga akan mempengaruhi pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri dari negara tersebut.

Berdasarkan ketiga elemen tersebut, konteks internasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri akan mengikuti kondisi internasional saat ini. Dimana menurut Rosecrance, ketergantungan ekonomi antar negara akan mengurangi permusuhan antar negara, dikarenakan negara tersebut akan mengkhawatirkan kepentingan ekonominya.³⁸ Begitupun dengan adanya sebuah organisasi regional. Organisasi regional yang didasarkan pada letak geografis juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya perang atau penggunaan kekuatan militer antara negara yang bertetangga, akan tetapi lebih dominan untuk melakukan suatu kerja sama yang kuat.

2. Pengambil Keputusan

Perilaku politik suatu negara dianggap sebagai cerminan dari perilaku pemimpin terkait aktivitas politik luar negeri negara tersebut. Kepribadian dan perilaku individual dalam politik luar negeri dinilai dapat mempengaruhi sikap pengambil keputusan dalam setiap keputusan yang dibuatnya. Namun, pengambil keputusan tidak dapat bergerak atas kemampuannya sendiri melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut adalah sistem internasional dan kondisi sosial dan politik yang ada dalam negerinya yang kemudian menjadi hambatan dan hal-hal yang

³⁸ Richard Rosecrance, *Rise of The Trading State* (New York, 1986)

membatasi aktivitas dari pengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai aktivitas politik yang dilakukan oleh pengambil keputusan, maka hal itu berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengambil keputusan dan bagaimana pengambil keputusan tersebut bereaksi atas hal itu. Namun, hal itu juga tidak berarti jika pemimpin yang kuat selalu menghasilkan sebuah kebijakan yang revolusioner bagi negaranya.

3. Politik Dalam Negeri

Dalam konsep determinan ini, keputusan politik luar negeri suatu negara akan dipengaruhi oleh stabilitas sistem politik dari negara tersebut. Negara dengan sistem politik terbuka atau negara demokrasi cenderung untuk berargumentasi di publik tentang kebijakan dalam aktivitas politik luar negerinya. Sedangkan negara dengan sistem politik tertutup atau negara otokratis mencapai konsensus secara individu. Tingkat stabilitas politik dalam negeri atau keterbukaan sistem politik negara tersebut mengarahkan politik luar negerinya pada aspek tertentu, namun faktor lain seperti konteks internasional dan pengambil keputusan juga ikut bekerja didalamnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga menjadi aspek yang mempengaruhi dalam Pembuatan suatu kebijakan luar negeri terkait politik dalam negeri negara tersebut. Menurut Rosenau sumber ini mencakup budaya, sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik.³⁹ Budaya dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa lalu. Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara termasuk harmoni dan konflik sosial didalamnya.

³⁹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 18

Sedangkan opini publik adalah perubahan sentimen masyarakat pada suatu fenomena.

4. Kondisi Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan ikut meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Begitupun, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka ada peningkatan pada kekuatan militernya. Kemampuan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh suatu negara berperan penting terhadap penyusunan politik luar negerinya. Dimana pengambil keputusan mendapatkan tuntutan dan dukungan terkait kondisi ekonomi dan militer yang dimiliki negara tersebut. Dapat disimpulkan, negara dengan ekonomi dan militer yang baik lebih mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional yang ingin dicapainya dengan kapabilitas negara itu sendiri. Negara dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat cenderung lebih aktif dalam politik internasional.

Konsep Determinan Politik Luar Negeri, digunakan oleh penulis untuk mengetahui faktor-faktor pendorong penarikan diri Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA)*. Selain itu, untuk memudahkan penelitian ini penulis juga menggunakan empat indikator-indikator determinan yaitu, konteks internasional, pengambil keputusan, politik dalam negeri, serta ekonomi dan militer. Konsep Determinan politik luar negeri oleh William D. Coplin ini kelak berperan untuk menggambarkan tujuan spesifik Amerika Serikat melakukan penarikan diri dari JCPOA.

1.8. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang ada merupakan data yang dihimpun dari literatur dan tulisan ilmiah yang dijadikan sebagai sumber utama dalam melihat permasalahan yang diangkat.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dari data-data yang ada bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian eksplanatif ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder yaitu penelitian yang analisisnya berlandaskan kepada data-data berupa dokumen, tulisan ilmiah serta laporan-laporan resmi yang saling memiliki keterkaitan yang membentuk pola-pola yang kemudian menjadi dasar peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan. Jenis ini dipilih agar penulis dapat menjelaskan alasan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA pada masa pemerintahan Donald Jhon Trump.

1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan 2018. Penelitian ini dimulai sejak tahun 2017 karena pada tahun inilah Donald Jhon Trump resmi menjadi Presiden, dan dikahiri sampai tahun 2018 karena Amerika Serikat resmi keluar dari JCPOA pada tahun ini.

1.8.3. Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya menjadi bahan Analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah negara, yaitu penarikan diri

⁴⁰ Claire Selitiz (et al), *Research Methods and Social Relations* (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc, 1976): 50-53

Amerika Serikat. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis, dalam penelitian ini unit ekplanasinya adalah kepentingan Amerika Serikat. Disamping itu yang menjadi tingkat analisis dalam penelitian kali ini adalah negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini menjadi jenis sumber data yang digunakan yaitu berupa penelitian dan literatur-literatur terdahulu. Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, dimana teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang membatasi pengambilan data pada koleksi pustaka atau pada literatur maupun dokumen tertulis yang sudah ada, dan tidak menggunakan data lapangan. Data-data di dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti buku-buku, laporan tahunan JCPOA, maupun dokumen-dokumen resmi. Jurnal rujukan utama dalam penelitian ini Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah, Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), dan *Iran's Quest for Nuclear Weapon Status American Debate on Pre-emptive Strike*. Peneliti juga mengambil sumber dari situs resmi pemerintah Amerika Serikat . Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber dalam melakukan penelitian ini. Kata kunci yang digunakan oleh penulis untuk memudahkan dalam mencari sumber yaitu, *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), *United States* dan *Nuclear Iran*.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Proses teknik analisis data penelitian terdiri dari, pertama peneliti mengumpulkan semua data yang relevan dengan topik penelitian dan kemudian

menginterpretasikannya. Kemudian peneliti melakukan reduksi terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang dianalisis agar dapat membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Kedua, penyajian data merupakan data-data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk analisis, interpretasi dan bagan yang kemudian dideskripsikan kembali berdasarkan interpretasi peneliti dengan menggunakan konsep yang dipakai. Terakhir adalah pengambilan kesimpulan, hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan akhir dari data-data yang sudah dianalisis oleh peneliti. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu konsep Determinan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *“Introduction of International Politic”*

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, unit analisis dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB II Kesepakatan Nuklir Iran Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Pada Masa Pemerintahan Barrack Obama dan Donald Jhon Trump

Bab ini menjelaskan mengenai kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) pada

masa pemerintahan Barrack Obama dan Donald Jhon Trump. Bab ini juga menjelaskan mengenai transisi hubungan kedua negara seiring dengan pergantian presiden Amerika Serikat.

BAB III Dinamika Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA)

Bab ini menjelaskan mengenai dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap JCPOA. Bab ini juga menjelaskan terkait sistem pengambilan keputusan di Amerika Serikat dan kepentingan nasional Amerika Serikat.

BAB IV Penarikan Diri Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Tahun 2018

Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis alasan keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA pada masa pemerintahan Donald Jhon Trump tahun 2018 menggunakan Konsep Determinan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penjelasan terkait kesimpulan dan saran.

